

**RENJA
T.A 2021**



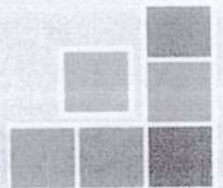
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA (DPMD)**

RANCANGAN AKHIR RENJA 2021



Alamat: Jalan SPG No.5
Randa Malingkung, Kode Pos: 71184



DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	I-1
1.1.1 Pengertian Renja	I-1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja.....	I-2
1.2 LANDASAN HUKUM	I-5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I-7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	I-8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN LALU	
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA	II-1
2.2 ANALISA KERJA PELAYANAN DPMD KABUPATEN TAPIN	II-3
2.3 ISU-ISU PENTING TUGAS DAN FUNGSI DPMD KABUPATEN TAPIN	II-5
2.4 RIVIEW TRHADAP RANCANGAN KERJA RKPD	II-9
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGATAN MASYARAKAT	II-11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI	III-1
3.2 TUJUAN DAN SASARAN	III-3
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perbub Nomor 33 Tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin menyusun Dokumen Renja 2021 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tapin.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tapin dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tapin.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tapin yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perdagangan sesuai Peraturan Bupati Tapin No. 33 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

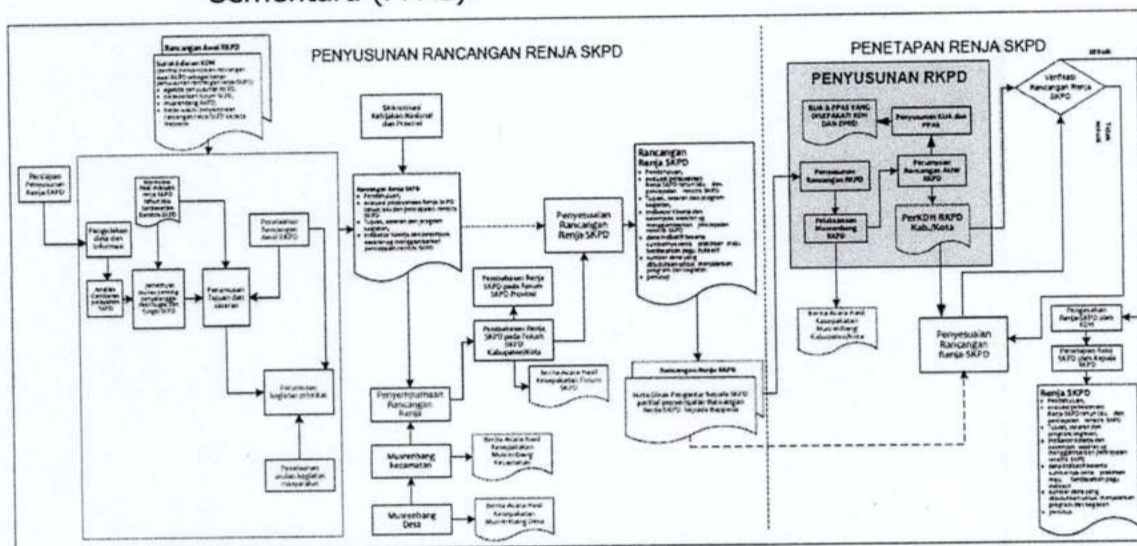
1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.

3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota
Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja
- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

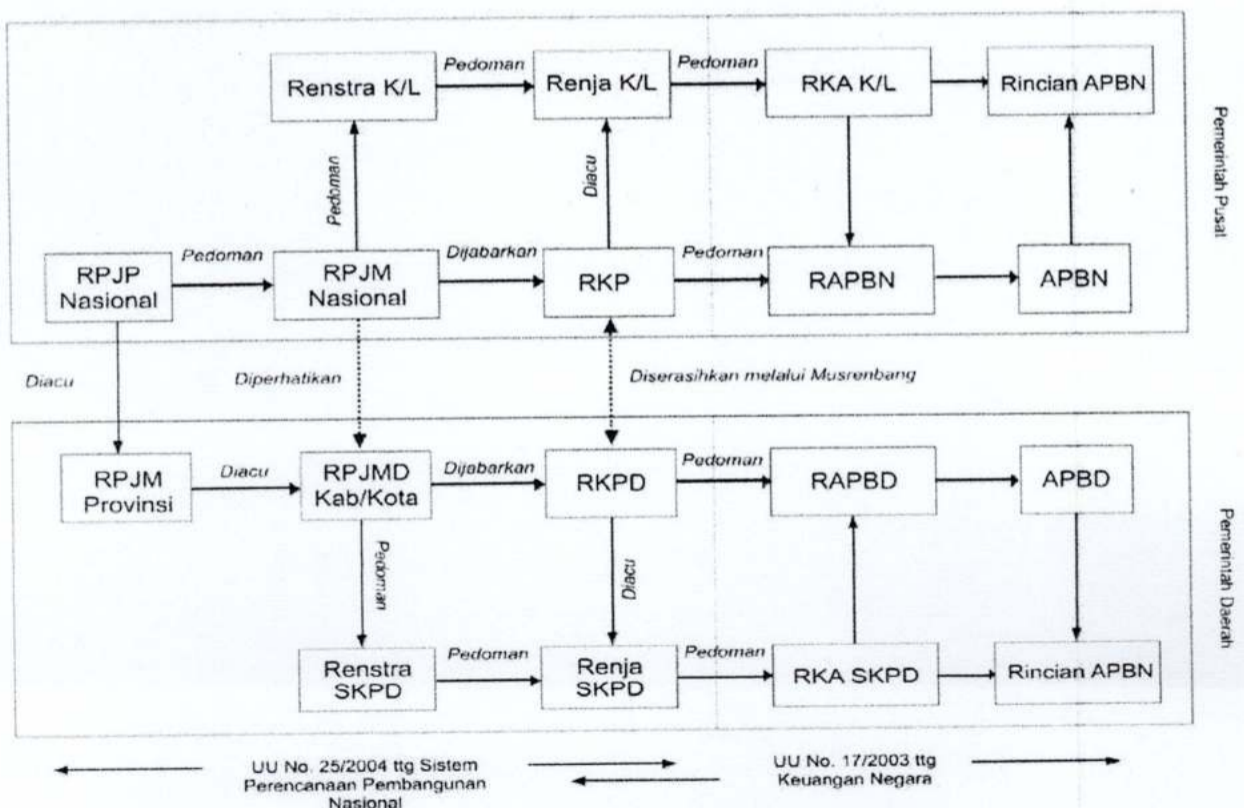
Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan OPD;

- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
 - Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - Perumusan tujuan dan sasaran;
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - Perumusan kegiatan prioritas;
 - Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2019
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
 - Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
 - Pembahasan forum OPD; dan
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja.

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tapin adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tapin Tahun 2018-2023 ;
18. Perbub Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Ladasan Hukum : Penetapan Renstra Perangkat Daerah 2018 – 2023 ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Pemendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tentang Pengarusutamaan Gender;
23. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor 050/01-Randal/Bappelitbang/2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahun 2021 ini adalah sebagai pedoman arah kerja bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin untuk jangka waktu satu tahun. Kebijakan dan program kegiatan disesuaikan antara program daerah, program provinsi dan program nasional sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien.

Tujuan rencana kerja tahun 2021 yaitu :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/ kegiatan tahunan sehingga program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan

sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada Renstra DPMD Kab.Tapin tahun kedua yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan lima tahunan 2018 - 2023

2. Agar program/kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab.
4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerja

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja SKPD DPMD dan kabupaten tapin tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan renja, landasan hukum penyusunan renja, maksud dan tujuan penyusunan renja dan sistematika penulisan dokumen renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD), analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Bab uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana yang tidak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Terdapat enam (6) program yang menjadi garapan wajib Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin dalam mewujudkan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : **“Terwujudnya Desa Mandiri melalui Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Pemberdayaan Masyarakat”** . Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 Menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dari tingkat realisasi rata-rata sampai dengan tahun 2019 adalah **89,97%** dimanan sejak berdiri tahun 2008 DPMD Kabupaten Tapin telah menetapkan Renstra 2018 – 2023.

A. Realisasi Program/Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di tergetkan bahwa Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan adalah 100%, tingkatan capaian kinerja realisasi anggarannya adalah 98,59%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di tergetkan bahwa persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik adalah 100%, tingkata capaian kinerja realisasi anggarannya adalah 94,87%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan di tergetkan bahwa persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun adalah 100%, tingkata capaian kinerja realisasi anggarannya adalah 80,39%.

4. Program Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan .

Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di tergetkan bahwa Persentase desa yang memiliki keselarasan RKPDesa terhadap RPJMDesa adalah 100%, tingkata capaian kinerja realisasi anggarannya adalah 97.32%.

5. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa .

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan di tergetkan bahwa Persentase pelatihan kopetensi bagi aparatur pemerintah desa yang dilaksanakan adalah 100%, tingkata capaian kinerja realisasi anggarannya adalah 81,22 %.

6. Program Keberdayaan Lembaga Masyarakat Perdesaan .

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa di tergetkan bahwa persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa adalah 100%, tingkata capaian kinerja realisasi anggarannya adalah 88,36%.

Tabel. T-II.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019
DPMD Kabupaten Tapin**

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2019
Kabupaten Tapin

Kode	Urusan/ bid urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra BPMPD Th 2013 - 2017	Realisasi target kinerja hasil prog& keluaran kegiatan s/d tahun 2014 (th n-3)	Target dan realisasi kinerja prog dan keluaran keg SKPD tahun 2015 (n-2)			Target program/ Keg Renja SKPD tahun berajalan (th 2016) (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target, prog/ kegiatan Renstra SKPD s/d th 2016 (n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)	12
1.22.1.22.01.01.01	Program pelayanan Administrasi perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1.22.1.22.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi SDA dan Listrik	60	24	12	12	100%	12	48	80%	
1.22.1.22.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	60	24	12	12	100%	12	48	80%	
1.22.1.22.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	waktu tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (bulan)	60	24	12	12	100%	12	48	80%	
1.22.1.22.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor dan surat kabar	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Barang Cetakam/Penggandaan dan Surat Kabar	60	24	12	12	100%	12	48	80%	
1.22.1.22.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakam dan Penggandaan	48	24	12	12	100%	12	48	100%	
1.22.1.22.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	24	12	9	75%	12	45	75%	
1.22.1.22.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	24	12	9	75%	12	45	75%	
1.22.1.22.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48	24	12	9	75%	12	45	94%	
1.22.1.22.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai	60	24	12	12	100%	12	48	80%	
1.22.1.22.01.01.01.19	Perjalanan Dinas	Fasilitasi Perjalanan Dinas	60	24	12	12	100%	12	48	80%	
1.22.1.22.01.01.01.20	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor & Keamanan Kantor	60	24	12	12	100%	12	48	80%	
1.22.1.22.01.01.01.21	Tapin Expo	Terselenggaranya Pameran Pembangunan Tapin expo	5	2	1	1	100%	1	4	80%	
1.22.1.22.01.01.01.22	Penyusunan renstra SKPD	Tersusunnya Rentra SKPD (kali)	1	0	0	0	0%	0	0	0%	

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)	12
1.22.01.01.02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersusunnya Renstra SKPD									
1.22.1.22.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	waktu terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor (bulan)	60	12	12	12	100%	12	36	60%	
1.22.1.22.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	waktu Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (bulan)	60	12	12	12	100%	12	36	60%	
1.22.01.01.06.01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
1.22.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	30	12	6	6	100%	6	18	60%	
1.22.01.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun (laporan)	25	10	5	5	100%	5	15	60%	
1.22.1.22.01.01.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	0	126 desa	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	126 desa	#VALUE!	#VALUE!	
1.22.1.22.01.01.16.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	waktu tersedianya laporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan (bulan)	60	12	12	12	97%	12	36	59,31%	
1.22.1.22.01.01.16.09	Pembinaan keterampilan manajemen UPK Gerbangmas-Taskin	Tersedianya Pembinaan keterampilan manajemen UPK Gerbangmas-Taskin (kali)	60	12	1	1	100%	12	25	41,67%	
1.22.1.22.01.01.16.12	Sharing Gerbangmas-Taskin	Tersedianya dana Sharing Gerbangmas-Taskin (Rp.juta)	699	271	140	95	68%	271	637	91,11%	
1.22.1.22.01.01.16.14	Fasilitasi permodalan bagi pengembangan BUMDes	Tersedianya Fasilitas permodalan bagi pengembangan BUMDes (desa)	126	5	1	1	100%	5	11	8,73%	
1.22.1.22.01.01.16.15	Sosialisasi Permentdes No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengelolaan dan pembubaran Bumdes	Sosialisasi Permentdes No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengelolaan dan pembubaran Bumdes	60	3	126	3	2%	3	9	15,00%	
1.22.1.22.01.01.16	Pengembangan badan usaha Milik Desa (BUMDes)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang dikembangkan (Buah)	126	5				5	10	7,94%	
1.22.1.22.01.01.16	Pembekalan teknis tenaga pendamping masyarakat dan UPK Desa	Jumlah tenaga pendamping masyarakat dan UPK Desa (orang)	60	12				12	24	40,00%	
1.22.1.22.01.01.16	Revitalisasi peran dan fungsi pasar desa	Jumlah pasar desa yang revitalisasi	60	12				12	24	40,00%	
1.22.1.22.01.01.16	Bimbingan teknik pengelolaan pasar desa	Jumlah Pengelola pasar yang mendapat bimbingan	60	12				12	24	40,00%	
1.22.1.22.01.01.16	Fasilitasi stimulan pembangunan desa	terlaksananya Fasilitasi stimulan pembangunan desa	60	0				0	0	0,00%	
1.22.1.22.01.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	0									
1.22.1.22.01.01.17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (desa/kali)	630	126	126	126	100%	126	378	60%	
1.22.1.22.01.01.17.03	Pemberian stimulan pembangunan desa	Persentase Pemberian stimulan pembangunan desa (desa)	60	0	12	9	75%	12	21	35%	
1.22.1.22.01.01.17.08	Pelaksanaan Musrembang Desa	Persentase Pelaksanaan Musrembang Desa (desa/kali)	630	252	126	126	100%	126	504	80%	
1.22.1.22.01.01.17.10	Fasilitasi Karya Bhakti TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa)	Persentase Fasilitasi Karya Bhakti TMMD (paket)	5	2	1	1	100%	1	4	80%	

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)	12
1.22.1.22.01.01.17.00	Penyusunan RPJMDesa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan RPJMDesa (desa/kali)	630	126	0	0		126	252	40%	
1.22.1.22.01.01.17.00	Penyusunan RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan) Desa	Tersusunnya RKP Desa (desa/kali)	630	126	0	0		126	252	40%	
1.22.1.22.01.01.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Peningkatan Kapasitas BPD									
1.22.1.22.01.01.19.02	Operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (desa/kali)	630	126	126	126	100%	126	378	60,00%	
1.22.1.22.01.01.19.03	Pertemuan Kader di Posyandu	Persentase Pertemuan Kader di Posyandu (desa/kali)	630	126	126	126	100%	12	264	41,90%	
1.22.1.22.01.01.19.04	Desa Percontohan PKK	Persentase Desa Percontohan PKK (desa)	5	2	1	1	100%	1	4	80,00%	
1.22.1.22.01.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa		0								
1.22.1.22.01.01.20.01	Fasilitasi, monitoring pelaksanaan dan pelantikan pilkades	Fasilitasi, monitoring pelaksanaan dan pelantikan pilkades	60	12	12	9	75%	12	33	55,00%	
1.22.1.22.01.01.20.02	Fasilitasi Penyusunan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDDesa	Terlaksananya pelatihan Penyusunan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDDesa (orang/kali)	1890	756	378	378	100%	378	1512	80,00%	
1.22.1.22.01.01.20.04	Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan	Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan (desa/)	630	126	126	126	100%	126	378	60,00%	
1.22.1.22.01.01.20.06	Perfomba Desa	Lomba Desa (desa/kali)	630	126	126	126	100%	126	378	60,00%	
1.22.1.22.01.01.20.07	Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah (kali)	630	126	126	126	100%	126	378	60,00%	
1.22.1.22.01.01.20.08	Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam pengadaan barang/jasa	Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam pengadaan barang/jasa	126	0	126	126	100%	0	126	100,00%	
1.22.1.22.01.01.21	Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan		0								
1.22.1.22.01.01.21.01	Fasilitasi PNPM Tamasa Perdesaan	Fasilitasi PNPM Tamasa Perdesaan	60	12	12	3	25,00%	12	27	45,00%	
1.22.1.22.01.01.21.03	Seminar dan Loka Karya Pembangunan Desa	Seminar dan Loka Karya Pembangunan Desa	60	12	12	3	25,00%	12	27	45,00%	
1.22.1.22.01.01.21.05	Pengutan Kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan Pengelola Dana Bergulir PNPm-MPd	Pengutan Kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan Pengelola Dana Bergulir PNPm-MPd	60	12	12	3	25,00%	12	27	45,00%	
1.22.1.22.01.01.21.06	Percepatan penanggulangan desa tertinggal/miskin	Percepatan penanggulangan desa tertinggal/miskin	60	12	12	3	100,00%	12	27	45,00%	
1.22.1.22.01.01.21.08	Fasilitasi Pasca PNPm_MPd dan Pendampingan Dana Desa	Fasilitasi Pasca PNPm_MPd dan Pendampingan Dana Desa	60	12	12	12		12	24	40,00%	
1.22.1.22.01.01.21.00	Usulan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)	Jumlah Kecamatan Lokasi PNPm-MPd (bulan)	60	12	12	12		12	24	40,00%	
1.22.1.22.01.01.21.00	Revitalisasi Peran dan Fungsi LPM/LKMD	Terlaksananya Revitalisasi Peran dan Fungsi LPM/LKMD (bulan)	60	12	12	12		12	24	40,00%	
1.22.1.22.01.01.21.00	Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Posyantekdes yang berfungsi Baik (bulan)	60	12	12	12		12	24	40,00%	
1.22.1.22.01.01.21.00	Pembangunan Gedung Kantor UPK	Jumlah Kantor UPK yang terbangun (bulan)	60	12	12	12		12	24	40,00%	
1.22.1.22.01.01.21.00	Seminar dan Loka Karya Pembangunan Desa	Terlaksananya Desiminasi dan Informasi bagi masyarakat desa (bulan)	60	12	12	12		12	24	40,00%	

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Tapin

Berdasarkan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan. Keberhasilan kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. T-II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
Kabupaten Tapin

Tabel. T.II.2
 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN TAPIN

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Restra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2015 (tahun n-2)	Tahun 2016 (tahun n-1)	Tahun 2017 (tahun n)	Kondisi Akhir Periode	Tahun 2015 (tahun n-2)	Tahun 2016 (tahun n-1)	Tahun 2017 (tahun n)	Tahun 2018 (tahun n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	126	126	126	126	126	126	126	126		
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	126	126	126	126	126	126	126	126		
3	Jumlah LSM		Jumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM)	5	5	5	5	5	5	5	5		
	Persentase Peringkat Desa yang dapat menyelesaikan laporan dengan baik			90%	90%	95%	95%	90%	90%	95%	95%	95%	
	Persentase Program Pembeanguan di Desa Memenuhi Target			90%	90%	95%	95%	90%	90%	95%	95%		
	Persentase Lembaga Masyarakat Desa Yang terbina dan berfungsi			65%	70%	75%	75%	65%	70%	75%	75%	75%	
	Persentase RKPD desa yang berkualitas			70%	70%	75%	75%	70%	70%	75%	75%		
	Persentase peningkatan pendapatan asli desa			1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	
	Persentase posyantik (pos pelayanan teknologi) yang berkualitas			10%	10%	15%	15%	10%	10%	15%	15%	15%	

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka terdapat 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi fokus dari SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Tapin yakni

- (1) Rata-rata jumlah Indeks Desa Membangun (IDM)
- (2) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dan

Berdasarkan uraian diatas maka tingkat capaian IKK dapat dianalisa dianalisa sebagai berikut :

- a. Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus :

$$\text{IDM} = \frac{\text{IKS} + \text{IKE} + \text{IKL}}{3}$$

IDM : Indeks Desa Membangun IKS : Indeks Ketahanan Sosial

IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan

- b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

$$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan PKK}}{\text{Jumlah PKK}} = \frac{125}{125} \times 100\% = 100\%$$

2.3 Isu-Isu Penting Tugas Dan Fungsi DPMD Kabupaten Tapin

Isu-isu yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memiliki dimensi yang cukup luas yakni otonomi desa, keberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat.

- a. Otonomi Desa, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan Pemantapan Kerangka Aturan/Regulasi: Pemantapan Kelembagaan Pemerintahan Desa; Pemantapan pengelolaan keuangan desa; Pemantapan Administrasi Pemerintahan Desa; Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa; dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan desa kearah yang lebih demokratis.
- b. Keberdayaan masyarakat, merupakan upaya mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, soial budaya, lingkungan hidup dan politik, sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam proses pembangunan.
- c. Partisipasi masyarakat, merupakan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
- d. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan 3 (tiga) indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan penduduknya. Kebijakan dan aktivitas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. IDM memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa dan

Pendamping serta Pendamping Lokal Desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Pemutakhiran Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus :

$$IDM = \frac{IKS+IKE+IKL}{3}$$

IDM : Indeks Desa Membangun IKS : Indeks Ketahanan Sosial

IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan

Adapun Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan nilai *ambang batas* sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal : $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang : $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju : $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri : $IDM > 0,8155$

Hasil Pemutakhiran Data IDM Kabupaten Tapin pada 2 (dua) tahun terakhir:

- Tahun 2019

Tabel Data IDM Kabupaten Tapin Tahun 2019

No	Nama Kecamatan	Status Desa				
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1	Binuang	0	0	6	2	0
2	Tapin Selatan	0	0	10	0	0
3	Tapin Tengah	0	3	14	0	0
4	Tapin Utara	0	0	12	0	0
5	Candi Laras Selatan	0	4	8	0	0
6	Candi Laras Utara	1	10	2	0	0
7	Bakarangan	0	0	12	0	0
8	Piani	0	2	6	0	0
9	Bungur	0	0	12	0	0

10	Lokpaikat	0	2	6	0	0
11	Salam Babaris	0	0	5	1	0
12	Hatungun	0	0	7	1	0
		1	21	100	4	0

Nilai Indeks Ketahanan Sosial : 0,7205

Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi : 0,5440

Nilai Indeks Ketahanan Lingkungan: 0,6386

Pada tahun 2019 Kabupaten Tapin memiliki nilai IDM 0,6344 atau Kabupaten berstatus "Berkembang" dengan rincian status-status IDM Desa sebagai berikut:

- ❖ Terdapat 4 (empat) Desa berstatus "Maju" yang berasal dari 3 (tiga) Kecamatan. Sedangkan mayoritas atau sebanyak 100 (seratus) Desa di Kabupaten Tapin adalah Desa berstatus "Berkembang", dengan persentase yang hampir mencapai angka 80% inilah yang membuat Kabupaten Tapin berhasil meninggalkan status "Tertinggal" bila dilihat dari tahun sebelumnya.
- ❖ Sebanyak 17% atau 22 (dua puluh dua) Desa di Kabupaten Tapin masih berstatus Desa "Tertinggal" dan "Sangat Tertinggal". Terdapat 1 (satu) Desa yang berstatus "Sangat Tertinggal" yang letaknya berada di ujung Kabupaten dengan akses jalan berkategori "rusak" dan hanya bisa dilewati motor serta harus memakai transportasi air untuk menuju Desa tersebut dari Desa sebelumnya.

Tahun 2020

Tabel Data IDM Kabupaten Tapin Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Status Desa				
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1	Binuang	0	0	6	2	0
2	Tapin Selatan	0	0	10	0	0
3	Tapin Tengah	0	0	17	0	0
4	Tapin Utara	0	0	12	0	0
5	Candi Laras Selatan	0	1	10	1	0
6	Candi Laras Utara	0	10	3	0	0
7	Bakarangan	0	0	12	0	0

8	Piani	0	0	8	0	0
9	Bungur	0	0	12	0	0
10	Lokpaikat	0	0	8	0	0
11	Salam Babaris	0	0	4	2	0
12	Hatungun	0	0	7	1	0
		0	11	109	6	0

Nilai Indeks Ketahanan Sosial : 0,7371

Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi : 0,5775

Nilai Indeks Ketahanan Lingkungan : 0,6482

Meskipun mengalami kenaikan nilai IDM sebesar 0,0199 atau menjadi 0,6543, status Kabupaten Tapin masih berada dalam klasifikasi "Berkembang". Hal ini dirasa wajar karena untuk mendapatkan status "Maju" sebuah Kabupaten minimal mempunyai 60% Desa berstatus "Maju" dengan catatan Kabupaten tersebut tidak lagi mempunyai Desa berstatus "Tertinggal" dan "Sangat Tertinggal". Sedangkan pada Tahun 2020, Kabupaten Tapin masih mempunyai Desa berstatus "Tertinggal" sebanyak 11 (sebelas) Desa dan Desa berstatus "Maju" menjadi sebanyak 6 (enam) Desa.

Adapun keberhasilan yang membanggakan pada Tahun 2020 ini adalah naiknya persentase Desa berstatus "Berkembang" menjadi 86% atau dengan jumlah 109 Desa serta tidak adanya lagi Desa berstatus "Sangat Tertinggal" yang masih ada di Kabupaten-Kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Renja RKPD

Pada Rancangan Renja RKPD Kabupaten Tapin tahun 2019 terdapat enam prioritas rencana pembangunan yaitu :

1. Kemiskinan

Terkait dengan masalah kemiskinan dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2018 adalah : 1) Belum optimalnya akses penduduk miskin dibidang pendidikan dan kesehatan, 2) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin

2. Akses dan Kualitas Pendidikan

Terkait dengan akses dan kualitas pendidikan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2016, diantaranya : 1) Belum tuntasnya wajib belajar 12 tahun, 2) Belum terpenuhinya standar pendidikan guru, 3) Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah, 4) Rendahnya jumlah lulusan yang diserap lapangan kerja.

3. Akses dan Kualitas Kesehatan

Terkait dengan akses dan kualitas kesehatan terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2016, diantaranya : 1) Perlu upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, 2) Masih tingginya angka kesakitan. Pada tahun 2009 lebih dari 350/1000 penduduk pernah mengalami keluhan kesehatan yang dapat menyebabkan terganggunya pekerjaan, sekolah dan kegiatan sehari-hari, 3) Masih tingginya penyakit menular, 4) Perlunya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.

4. Kinerja Pemerintahan

Terkait dengan kinerja pemerintah daerah terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2016, diantaranya : 1) Belum optimalnya pelayanan publik, 2) Perlunya pengembangan kapasitas dan pembinaan aparatur, 3) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran yang representatif.

5. Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Terkait dengan pengendalian lingkungan hidup dan tata ruang terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun

2016, diantaranya : 1) Belum optimalnya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang, 2) Belum optimalnya pengelolaan sampah, 3) Masih minimnya ruang publik.

6. Sarana Prasarana Transportasi

Terkait dengan pengembangan sarana prasarana transportasi dan pemukiman terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2017, diantaranya : 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana jalan dan jembatan, 2) Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas

Dari ke enam aspek prioritas di atas, DPMD Kabupaten Tapin sebagai salah satu SKPD dalam bidang Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, secara khusus prioritas pembangunan yang menjadi bagian dari DPMD adalah aspek penanggulangan kemiskinan dan kinerja pemerintahan sedangkan secara umum DPMD terlibat dalam seluruh aspek sebagaimana dijelaskan diatas.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Tapin seperti dalam Tabel di bawah ini :

**Review terhadap Rancangan Renja RKPD tahun 2019 DPMD Kabupaten Tapin
(Terlampir)**

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2019

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Rancangan awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Kebutuhan Dana (Ribu Rp)	Cetakan Penting	
			Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikator (Ribu Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja			Target Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BADAN PEKERJAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA											
	Program Pelayanan administrasi Perkantoran		Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (persen)	81,37%	1.650.964.608					1.650.964.608	
1	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapin	Waktu Penyediaan JasaKomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bh	46.200.000	Kab. Tapin	Waktu Penyediaan JasaKomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bh	12 bh	46.200.000	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Tapin	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 bh	69.700.000	Kab. Tapin	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bh	12 bh	69.700.000	
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab. Tapin	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0 bh		Kab. Tapin	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0 bh	0 bh		
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Tapin	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bh	58.263.608	Kab. Tapin	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bh	12 bh	58.263.608	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tapin	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bh	6.500.000	Kab. Tapin	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bh	12 bh	6.500.000	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tapin	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bh	21.000.000	Kab. Tapin	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bh	12 bh	21.000.000	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapin	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 bh		Kab. Tapin	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 bh	0 bh		
8	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tapin	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0 bh		Kab. Tapin	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0 bh	0 bh		
9	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai	12 bh	12.000.000		Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bh	12 bh	12.000.000	
10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor & Keamanan Kantor	Kab. Tapin	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor & Keamanan Kantor	12 bh	26.000.000	Kab. Tapin	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor & Keamanan Kantor	12 bh	12 bh	26.000.000	
11	Tapin Expo/Pameran Pembangunan	Kab. Tapin	Terselenggaranya Pameran Pembangunan/Tapin expo	1 kali	20.000.000	Kab. Tapin	Tapin Expo/Pameran Pembangunan	1 kali	1 kali	20.000.000	
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Tapin	Fasilitasi Perjalanan Dinas	12 bh	1.391.301.000	Kab. Tapin	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bh	12 bh	1.391.301.000	
13	Penyusunan Renstra SKPD	Kab. Tapin	Tersusunnya Renstra SKPD	0 bh		Kab. Tapin	Penyusunan Renstra SKPD	0 bh	0 bh		
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik (persen)	100%	88.650.000		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	88.650.000	
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Tapin	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bh	5.000.000	Kab. Tapin	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bh	12 bh	5.000.000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Tapin	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bh	45.150.000	Kab. Tapin	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bh	12 bh	45.150.000	
3	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Kab. Tapin	Terselenggaranya perlengkapan dan peralatan kantor	12 bh	35.000.000	Kab. Tapin	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12 bh	12 bh	35.000.000	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala perabotan gedung kantor	Kab. Tapin	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala perabotan gedung kantor	12 bh	3.500.000	Kab. Tapin	Pemeliharaan Rutin/Berkala perabotan gedung kantor	12 bh	12 bh	3.500.000	
III	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Wajib Disusun (persen)	100%	11.420.000		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	11.420.000	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapin	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 laporan	5.460.000	Kab. Tapin	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	8 laporan	5.460.000	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun	Kab. Tapin	Tersusunnya laporan keuangan semester dan akhir tahun	13 laporan	5.960.000	Kab. Tapin	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun	13 laporan	13 laporan	5.960.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan		Persentase peningkatan pendapatan asli desa.	11,0%	100.100.000	Program Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan	Kab. Tapin	Persentase peningkatan pendapatan asli desa.	11,0%	100.100.000	
IV	Pembinaan Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan	Kab. Tapin	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang dikembangkan	126 desa	50.380.000	Pembinaan Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan	Kab. Tapin	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang dikembangkan	126 desa	50.380.000	
1	Pembentukan Posyantik Kecamatan dan Pemyarakatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Tapin	Jumlah desa lokasi sasaran Gerbangmas-Tasikin	1 ds 6 posyantik	49.720.000	Pembentukan Posyantik Kecamatan dan Pemyarakatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Tapin	Jumlah desa lokasi sasaran Gerbangmas-Tasikin	ds 6 posyantik	49.720.000	
2	Monitoring dan Evaluasi UPK Gerbangmas-Tasikin	Kab. Tapin	Jumlah UPK Gerbangmas-Tasikin yang dimonitoring dan di evaluasi	0 bh		Monitoring dan Evaluasi UPK Gerbangmas-Tasikin	Kab. Tapin	Jumlah UPK Gerbangmas-Tasikin yang dimonitoring dan di evaluasi	0 bh		
3	Pembinaan Kegiatan UPK Gerbangmas-Tasikin, Pasar Desa dan BUMDesa	Kab. Tapin	Jumlah Tenaga Pendamping Masyarakat dan UPK desa yang dibekali	0 desa		Pembinaan Kegiatan UPK Gerbangmas-Tasikin, Pasar Desa dan BUMDesa	Kab. Tapin	Jumlah Tenaga Pendamping Masyarakat dan UPK desa yang dibekali	0 desa		
4	Sosialisasi permenides no 4 th 2015	Kab. Tapin	Tersosialisasinya permenides no 4 th 2015	0 desa		Sosialisasi permenides no 4 th 2015	Kab. Tapin	Tersosialisasinya permenides no 4 th 2015	0 desa		
5	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah desa	Kab. Tapin	Persentase Perangkat Desa yang dapat menyelesaikan laporan dengan baik	90%	534.020.000	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah desa	Kab. Tapin	Persentase Perangkat Desa yang dapat menyelesaikan laporan dengan baik	90%	534.020.000	
VII	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah desa	Kab. Tapin	Persentase Program Pemebangunan di Desa Memenuhi Target	80%		Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah desa	Kab. Tapin	Persentase Program Pemebangunan di Desa Memenuhi Target	80%		
1	fasilitasi Pemilihan dan Pelatihan Kepala Desa	Kab. Tapin	Jumlah desa yang di fasilitasi dalam pemilihan kepala desa	0 desa		fasilitasi Pemilihan dan Pelatihan Kepala Desa	Kab. Tapin	Jumlah desa yang di fasilitasi dalam pemilihan kepala desa	0 desa		
2	Lomba Desa	Kab. Tapin	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat kabupaten	12 desa	126.950.000	Lomba Desa	Kab. Tapin	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat kabupaten	12 desa	126.950.000	
3	fasilitasi Penyusunan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBD Desa	Kab. Tapin	Jumlah desa yang memiliki APBD Desa	126 bh	372.370.000	fasilitasi Penyusunan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBD Desa	Kab. Tapin	Jumlah desa yang memiliki APBD Desa	126 bh	372.370.000	
4	fasilitasi Penyusunan Data Profil Desa	Kab. Tapin	Jumlah desa yang memiliki data profil desa	126 desa	34.700.000	fasilitasi Penyusunan Data Profil Desa	Kab. Tapin	Jumlah desa yang memiliki data profil desa	126 desa	34.700.000	
5	pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan	Kab. Tapin	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dilatih dalam bidang pengelolaan keuangan desa	0 org		pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Kab. Tapin	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dilatih dalam bidang pengelolaan keuangan desa	0 org		
6	pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam pengadaan barang / jasa	Kab. Tapin	Jumlah Aparatur pemerintahan desa yg di latih dalam pengadaan barang / jasa	0 org		pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam pengadaan barang / jasa	Kab. Tapin	Jumlah Aparatur pemerintahan desa yg di latih dalam pengadaan barang / jasa	0 org		
VIII	Program Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Kab. Tapin	Rate-rato jumlah kelompok binaan PKK	100%	499.694.000	Program Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Kab. Tapin	Rate-rato jumlah kelompok binaan PKK	100%	499.694.000	
1	Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK)	Kab. Tapin	Jumlah pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten	1 PKK	367.889.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK)	Kab. Tapin	Jumlah pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten	1 PKK	367.889.000	
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan Desa melalui Pokjoral Posyandu	Kab. Tapin	Jumlah Pokjoral posyandu yang di pemberdayaan dan pengembangan	126 Pokja Posyandu	50.000.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan Desa melalui Pokjoral Posyandu	Kab. Tapin	Jumlah Pokjoral posyandu yang di pemberdayaan dan pengembangan	126 Pokja Posya	50.000.000	
3	Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dasar Melalui Kader Posyandu	Kab. Tapin	Jumlah posyandu yang alberdayakan dan dikembangkan	194 Posyandu	122.976.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dasar Melalui Kader Posyandu	Kab. Tapin	Jumlah posyandu yang alberdayakan dan dikembangkan	194 Posyandi	122.976.000	
4	Pemetaan Identifikasi dan Kaitifikasi Desa Bersarkan IDM	Kab. Tapin	Jumlah Desa yg teridentifikasi berdasarkan IDM	126 desa	74.422.000	Pemetaan Identifikasi dan Kaitifikasi Desa Bersarkan IDM	Kab. Tapin	Jumlah Desa yg teridentifikasi berdasarkan IDM	126 desa	74.422.000	
5	Pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga	Kab. Tapin	Jumlah Lembaga Desa yang albina	126 desa	81.805.000	Pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga	Kab. Tapin	Jumlah Lembaga Desa yang albina	126 desa	81.805.000	

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2019 DPMD Kabupaten Tapin memiliki 6 program untuk APBD Kabupaten, diantara program/ Kegiatan tersebut adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan (1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, (2) Penyediaan jasa administrasi keuangan, (3) Penyediaan alat tulis kantor, (4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, (5) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, (6) Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor, (7) Penyediaan makanan dan minuman, (8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, (9) Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor, (10) Tapin Expo 2019;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan (1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, (2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, (3) Penyediaan Perlengkapan dan peralatan kantor, (4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ;
- c. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan (1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan (2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun.
- d. Program Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan dengan kegiatan (1) Pembinaan Kapasitas Lembaga Ekonomi Pedesaan, (2) Pemasarakatam Posyantek dan Teknologi Tepat Guna;
- e. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dengan kegiatan (1) Fasilitasi, Monitoring dan Pelantikan Kepala Desa Gelombang III (2) Pendampingan dan Penyusunan Data Profil Desa, (3) Perlombaan Desa, (4) Pendampingan Penyusunan, pengelolaan dan PertanggungjawabanDesa;
- f. Program Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan dengan kegiatan (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), (2) Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan Desa Melalui Pokjanal Posyandu (3) Karya Bhakti TMMD, (4) Pemetaan Identifikasi dan Klarifikasi Desa Berdasarkan IDM, (5) Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Lembaga

Program DPMD Kabupaten Tapin untuk tahun 2019 mengacu pada rancangan renja RKPD tahun 2019 dan untuk kegiatan terdiri dari 6 Program dengan 26 kegiatan. Seperti tertulis pada tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel. T-II.3

Usulan program dan kegiatan DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2019

Tabe. T-II.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2019
Kabupaten Tapin

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / Volume	Pagu indikator (Ribuan Rp)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA						
#REF!						

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

3.1.1 Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisa kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang di rumuskan dalam RKP (rancangan awal) , yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2018 yang terkait untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi , dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan semiliran agenda prioritas . Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, Yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.
6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan.
9. Kami akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 – 2019 yang dilaksanakan pada pemerintah saat ini, salah satunya memiliki tema pokok maupun fokus pada pengembangan wilayah Kalimantan baik sebagai bagian dari internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak ditengah-tengah wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki pulau Kalimantan menjadikan pulau Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor nasional, regional ASEAN, hingga global atau internasional. Dalam koridor nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengeksport batu bara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level internasional, selain sebagai paru-paru dunia juga Kalimantan merupakan penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energi kehidupan manusia saat ini.

Pada perencanaan pembangunan nasional periode ini, tema pengembangan wilayah regional Kalimantan yang diusung adalah :

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;
2. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;
3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauskit, bijih besi, gas alam cair, pasir zircon, dan pasir kuarsa
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan pengembangan wilayah pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah pulau Kalimantan dengan menekankan pada keunggulan dan potensi daerahnya masing-masing, melalui :

1. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauskit, bijih besi, gas alam cair, pasir zircon, dan pasir kuarsa;

2. Penyediaan infrastruktur wilayah;
3. Peningkatan SDM serta ilmu dan teknologi secara terus menerus

3.1.2. Telaahan terhadap kebijakan provinsi

Berdasarkan hasil analisis yang mengiringi pembangunan provinsi Kalimantan selatan selama ini, isu pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, maka dapat dirumuskan telaahan kebijakan provinsi Kalimantan selatan dalam rangka pembangunan provinsi Kalimantan selatan yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Sustainability development sebagai focus pembangunan provinsi Kalimantan selatan
2. Akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
4. Shifting struktur perekonomian daerah
5. Perwujudan democratic governance melalui reformasi birokrasi
6. Ketahanan Pangan
7. Ketahanan Energi
8. Degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan
9. Bonus Demografi
10. Implementasi SPM dalam pelayanan public

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD DPMD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja DPMD selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran SKPD DPMD pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indicator sasaran pada tahun 2017 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada table berikut :

Terlampir Tabel. T-III.1
Tujuan dan Sasaran SKPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Tapin Tahun 2019 terdiri atas 6 Program dan 26 Kegiatan dengan total usulan berjumlah Rp. 4.678.037.577,-

b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Penyebaran kegiatan difokuskan kepada 12 Kecamatan dan 126 desa serta 9 kelurahan yang ada di Kab.Tapin sedangkan untuk teknis pelaksanaan terbagi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMD Kab.Tapin, Dilaksanakan bekerjasama dengan Kecamatan serta Kerjasama dengan Desa/Kelurahan.

Program dan Kegiatan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2019 beserta prognosisnya dapat dilihat pada Lampiran III.1

Tabel. T-III.1
Tujuan dan Sasaran SKPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tapin

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Kinerja Sasaran pada tahun	
				Tahun 2017 (realisasi)	Kondisi Akhir Periode
1	URAIAN	URAIAN		5	9
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Perangkat Desa yang dapat menyelesaikan laporan dengan baik	95%	95%
2	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Persentase Program Pemebanguan di Desa Memenuhi Target	90%	90%
3	Meningkatkan Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga ekonomi mikro perdesaan	meningkatnya Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga ekonomi mikro perdesaan	Persentase Lembaga Masyarakat Desa Yang terbina dan berfungsi	75%	75%
4	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Prosentase RKPDesa yang berkualitas.	40%	40%
			Persentase peningkatan pendapatan asli desa.	35,0%	35,0%
			Persentase posyantek (pos pelayanan teknologi) yang berkualitas	25%	25%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Prov Kalsel, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2021 ini merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang merupakan Rangkaian Rencana tindakan dan Kegiatan yang berdasar dan Berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir Tahun 2021.

Rencana Kerja Memuat tujuan dan sasaran, Program dan Kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh sasaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.

Dengan Mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin, Penyusunan Renja diharapkan mampu Mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan Strategis baik diintern SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin maupun dilingkungan daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan didalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2018-2023 yaitu "Terwujudnya Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis".

BUPATI TAPIN

H.M. ARIFIN ARFAN

Rencana Program dan Kegiatan pada RENJA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2021
Kabupaten Tapin


Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2021 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2022	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						2.766.483.577	0	0		91.360.000
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa										
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	1.093.534.877	0	0	98	0
2	2			TAPIN		Waktu penyediaan jasa Telephone , Internet ,Listrik dan Air	55.500.000	0	0	12 Bulan	0
2	7			TAPIN		Waktu penyediaan Administrasi Keuangan	90.100.000	0	0	12 Bulan	0
2	7			TAPIN		Waktu penyediaan ATK	63.258.300	0	0	12 Bulan	0
2	7			TAPIN		Waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	0	0	12 Bulan	0
2	7			TAPIN		Waktu Penyediaan Makan dan Minum harian Pegawai	60.013.000	0	0	12 Bulan	0
2	7			TAPIN		Waktu Pelaksanaan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	726.483.577	0	0	12 Bulan	0
2	7			TAPIN		Pelaksanaan HUT kabupaten	25.000.000	0	0	1 Kali	0

2	7	1	21	Penyediaan jasa Perbaikan dan peralatan Kerja				TAPIN				0	0	0	0		0
2	7	1	22	Penyediaan jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor				TAPIN		Waktu Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 Bulan	33.180.000	0	0	0	12 Bulan	0
2	7	2		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	98%	66.590.000	0	0	0	98	0
2	7	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				TAPIN		Waktu Pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	10.000.000	0	0	0	12 Bulan	0
2	7	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				TAPIN		Waktu Peliharaan Kendaraan Oprasioanal Kantor	12 Bulan	38.485.875	0	0	0	12 Bulan	0
2	7	2	45	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				TAPIN				6.000	0	0	0		0
2	7	2	46	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor				TAPIN		Waktu Peliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	18.098.125	0	0	0	12 Bulan	0
2	7	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	95 %	9.623.000	0	0	0	97	0
2	7	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD				TAPIN		Jumlah laporan capai kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 Laporan	4.597.000	0	0	0	9 Lapofan	0
2	7	6	5	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun				TAPIN		Jumlah laporan keuangan semester dan akhir tahun	6 Laporan	5.026.000	0	0	0	6 Lapofan	0
2	7	21		Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa			Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar	47 %	528.140.430	0	0	0	67	91.360.000
2	7	21	5	Pendampingan Penyusunan Data Profil Desa				TAPIN				48.718.000	0	0	0		0
2	7	21	6	Perlombaan Desa				TAPIN		Jumlah Desa yg mengikuti perlombaan desa tingkat kabupaten	12 Desa	177.406.556	0	0	0	12 Desa	91.360.000
2	7	21	7	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa				TAPIN				11.157.874	0	0	0		0

2	7	21	8	Pendampingan Penyusunan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBD Desa			TAPIN	Jumlah desa yang di dampingi dalam Penyusunan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBD Desa	126 Desa	0	0	100.798.000	0	0	126 Desa	0
2	7	21	9	Pembuatan PERDA dan PERBUB Berkaitan dengan PEMDES			TAPIN			0	0	45.660.000	0	0		0
2	7	21	17	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa			TAPIN			0	0	144.400.000	0	0		0
2	7	23	23	Program Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa			- Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten - Persentase BUMDES yang aktif - Persentase BUMDES menghasilkan laba	79 % 81 % 1,85 %	0	0	365.075.100	0	0	2,00	0
2	7	23	1	Pembinaan Kapasitas Lembaga Ekonomi Pedesaan			TAPIN	Jumlah BUMDes yang di bina	126 BUMDes	0	0	32.760.000	0	0	126 BUMDes	0
2	7	23	2	Pendampingan Perencanaan Pembangunan Desa			TAPIN			0	0	28.278.100	0	0		0
2	7	23	3	Pemasyarakatan Posyantek dan Teknologi Tepat Guna			TAPIN	Jumlah posyantek yang dikembangkan	5 posyantek	0	0	99.940.000	0	0	5 posyantek	0
2	7	23	4	Pendampingan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)			TAPIN			0	0	25.032.000	0	0		0
2	7	23	5	Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Desa (DAPM)			TAPIN			0	0	0	0	0		0
2	7	23	6	Pendampingan Program Inovasi Desa (Inovasi Desa)			TAPIN			0	0	0	0	0		0
2	7	23	9	Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan			TAPIN			0	0	0	0	0		0
2	7	23	10	Kegiatan Pengembangari Usaha Ekonomi Desa			TAPIN			0	0	0	0	0		0
2	7	23	11	Kegiatan Pengembangari dan Pemanfaatan SDA			TAPIN			0	0	0	0	0		0

2	7	23	12	Kegiatan Pengembangan, Penerapan dan Pemasarakan TTG			TAPIN		49.845.000	0	0	0	0
2	7	23	13	Kegiatan Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan TTG			TAPIN		0	0	0	0	0
2	7	23	14	Kegiatan Pengembangan BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan			TAPIN		129.220.000	0	0	0	0
2	7	23	15	Kegiatan Peningkatan Permodalan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan			TAPIN		0	0	0	0	0
2	7	24		Program Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa				703.520.170	0	0	88	0
2	7	24	1	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			TAPIN	Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kabupaten	415.190.000	0	0	1 PKK	0
2	7	24	2	Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan Desa Melalui Pokjantal Posyandu			TAPIN	Jumlah pokjantal posyandu yang dikembangkan dan diberdayakan	62.830.000	0	0	126 pokjantal	0
2	7	24	3	Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dasar Melalui Kader Posyandu			TAPIN	Jumlah posyandu yang diberdayakan dan dikembangkan	137.400.000	0	0	194 poyandu	0
2	7	24	5	Pemberdayaan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya di Masyarakat			TAPIN		170	0	0	0	0
2	7	24	6	Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)			TAPIN	Jumlah desa yang memutakhirkan data IDM	88.100.000	0	0	126 Desa	0
2	7	24	7	Pembiayaan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Lembaga			TAPIN		0	0	0	0	0
2	7	24	16	Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui Lomba			TAPIN		0	0	0	0	0
2	7	24	17	Pembiayaan Kelompok Masyarakat Pemangunan Desa			TAPIN		0	0	0	0	0

2	7	24	18	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Gotong Royong Masyarakat Desa		TAPIN		0	0	0	0	0	
2	7	24	22	Karya Bhakti TMMD		TAPIN	pertisipasi masyarakat desa dalam kegiatan TMMD	0	0	0	0	750 org	0
TOTAL													
								2.766.483.577	0	0	0	0	91.360.000

		RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKAP SKPD 2.2.1	
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN Tahun Anggaran 2021					
Urusan Pemerintahan	:	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
Bidang Urusan	:	2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Unit Organisasi	:	2.07 1.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
Program	:	2.07 1.01 24	Program Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan		
Kegiatan	:	2.07 1.01 24 . 05	Pemberdayaan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya di Masyarakat		
Lokasi	:	TAPIN			
Pagu Tahun N-1	:		Rp. 0,00		
Pagu Tahun N	:		Rp. 9.000,00		
Pagu Tahun N+1	:		Rp. 0,00		
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG					
INDIKATOR				TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM	- Persentase posyandu aktif				87 %
CAPAIAN PROGRAM	- Persentase PKK aktif				94 %
CAPAIAN PROGRAM	- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				91 %
MASUKAN	Jumlah Dana				Rp. 9.000
KELUARAN	waktu Pemberdayaan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya di Masyarakat				12 bulan
HASIL	- Persentase posyandu aktif				87 %
HASIL	- Persentase PKK aktif				94 %
HASIL	- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				91 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat					
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6=3x5
5	BELANJA				9.000
5.2	BELANJA LANGSUNG				9.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa				9.000
5.1.2.1	Belanja Barang				9.000

5.1.2.1.1	Belanja Bahan Pakai Habis				0
5.1.2.1.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor				0
5.1.2.1.3	Belanja Cetak/Penggandaan				9.000
5.1.2.1.3.2	Belanja Penggandaan				9.000
	<i>Disediakan untuk</i>				
	-Belanja Penggandaan	30	lembar	300	9.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


Keterangan :

Rantau, 29 July 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Drs. RAHMADI

NIP. 19760302 199412 1 001

		RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKAP SKPD 2.2.1	
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN Tahun Anggaran 2021					
Urusan Pemerintahan	: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
Bidang Urusan	: 2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Unit Organisasi	: 2.07 1.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
Program	: 2.07 1.01 24	Program Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan			
Kegiatan	: 2.07 1.01 24 . 01	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			
Lokasi	: TAPIN				
Pagu Tahun N-1	:	Rp. 0,00			
Pagu Tahun N	:	Rp. 415.081.170,00			
Pagu Tahun N+1	:	Rp. 0,00			
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG					
INDIKATOR		TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA	
CAPAIAN PROGRAM		- Persentase posyandu aktif		87 %	
CAPAIAN PROGRAM		- Persentase PKK aktif		94 %	
CAPAIAN PROGRAM		- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		91 %	
MASUKAN		Jumlah Dana		Rp. 415.081.170	
KELUARAN		Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kabupaten		1 PKK	
HASIL		- Persentase posyandu aktif		87 %	
HASIL		- Persentase PKK aktif		94 %	
HASIL		- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		91 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6=3x5
5	BELANJA				415.081.170
5.2	BELANJA LANGSUNG				415.081.170
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa				415.081.170
5.1.2.1	Belanja Barang				254.881.170

5.1.2.1.1	Belanja Bahan Pakai Habis					51.100.000
5.1.2.1.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor					0
5.1.2.1.1.4	Belanja Peranko, Materai, dan Benda Pos					2.100.000
	<i>Disediakan untuk</i>					<u>2.100.000</u>
	-Materai 6000	300		lembar	6.000	1.800.000
	-Materai 3000	100		lembar	3.000	300.000
5.1.2.1.1.5	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					5.000.000
	<i>Disediakan untuk</i>					<u>5.000.000</u>
	-Belanja Bahan Pembersih	1		paket	2.500.000	2.500.000
	-Belanja Peralatan Kebersihan	1		paket	2.500.000	2.500.000
5.1.2.1.1.11	Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir					44.000.000
	<i>Disediakan untuk</i>					<u>44.000.000</u>
	-Piala acrylic Lomba 5 Set (juara dan juara harapan 1, 2, 3)	5		paket	3.400.000	17.000.000
	-Piala acrylic Lomba juara umum	1		tahun	1.500.000	1.500.000
	-Uang Pembinaan Juara Umum, Juara 1, Juara 2 dan Juara 3	1		tahun	25.500.000	25.500.000
5.1.2.1.3	Belanja Cetak/Penggandaan					48.301.170
5.1.2.1.3.1	Belanja Cetak					21.000.000
	<i>Disediakan untuk</i>					<u>21.000.000</u>
	-Belanja Cetak	1		tahun	21.000.000	21.000.000
5.1.2.1.3.2	Belanja Penggandaan					27.301.170
	<i>Disediakan untuk</i>					<u>27.301.170</u>
	-Belanja Jilid	1		tahun	3.000.000	3.000.000
	-Belanja Penggandaan	1		tahun	24.301.170	24.301.170
5.1.2.1.4	Belanja Makanan dan Minuman					100.000.000
5.1.2.1.4.1	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai					5.000.000
	<i>Disediakan untuk</i>					<u>5.000.000</u>
	-Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1		tahun	5.000.000	5.000.000
5.1.2.1.4.2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					60.000.000
	<i>Disediakan untuk</i>					<u>60.000.000</u>
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1		tahun	60.000.000	60.000.000
5.1.2.1.4.3	Belanja Makanan dan Minuman Tamu					10.000.000
	<i>Disediakan untuk</i>					<u>10.000.000</u>

5.1.2.1.4.4	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia <i>Disediakan untuk</i>	1	tahun	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.1.2.1.5	-Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1	tahun	25.000.000	25.000.000	25.000.000
5.1.2.1.5.6	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) <i>Disediakan untuk</i>	1	tahun	26.000.000	26.000.000	26.000.000
5.1.2.1.6	-Belanja Pakaian Seragam PKK lengkap Belanja Pakaian Kerja	0		0	0	0
5.1.2.1.6.1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan <i>Disediakan untuk</i>	0		0	0	0
5.1.2.1.7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu			29.480.000	29.480.000	29.480.000
5.1.2.1.7.3	Belanja Pakaian Batik Tradisional <i>Disediakan untuk</i>			29.480.000	29.480.000	29.480.000
5.1.2.2	-Belanja Pakaian Batik Tradisional (Seragam Kembaran)	1	tahun	29.480.000	29.480.000	29.480.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			160.200.000	160.200.000	160.200.000
5.1.2.2.1.80	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan <i>Disediakan untuk</i>	24	bulan	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5.1.2.2.1.84	-Tenaga Teknis/Kontrak (2 Orang x Rp. 1.800.000) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi <i>Disediakan untuk</i>	1	tahun	117.000.000	117.000.000	117.000.000
	-Belanja Kontribusi			117.000.000	117.000.000	117.000.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


Keterangan :

Rantau, 29 July 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Drs. RAHMADI

NIP. 19760302 199412 1 001

		RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKAP SKPD 2.2.1	
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN Tahun Anggaran 2021					
Urusan Pemerintahan	: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
Bidang Urusan	: 2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Unit Organisasi	: 2.07 1.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
Program	: 2.07 1.01 24	Program Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan			
Kegiatan	: 2.07 1.01 24 . 22	Karya Bhakti TMMD			
Lokasi	: TAPIN				
Pagu Tahun N-1	:	Rp. 0,00			
Pagu Tahun N	:	Rp. 100.000,00			
Pagu Tahun N+1	:	Rp. 0,00			
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG					
INDIKATOR		TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		
CAPAIAN PROGRAM		- Persentase posyandu aktif		87 %	
CAPAIAN PROGRAM		- Persentase PKK aktif		94 %	
CAPAIAN PROGRAM		- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		91 %	
MASUKAN		Jumlah Dana		Rp. 100.000	
KELUARAN		pertisipasi masyarakat desa dalam kegiatan TMMD		750 org	
HASIL		- Persentase posyandu aktif		87 %	
HASIL		- Persentase PKK aktif		94 %	
HASIL		- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		91 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat					
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6=3x5
5	BELANJA				100.000
5.2	BELANJA LANGSUNG				100.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa				100.000
5.1.2.1	Belanja Barang				100.000

5.1.2.1.1.3	Belanja Cetak/Penggandaan					100.000
5.1.2.1.1.3.2	Belanja Penggandaan <i>Disediakan untuk</i> -Penggandaan	1	Tahun	100.000		100.000
						<u>100.000</u>
						100.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Keterangan :

Rantau, 29 July 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Drs. RAHMADI

NIP. 19760302 199412 1 001